



Evaluasi Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kota Tomohon

David J. Parengkuan¹, Melkior Sitokdana²

^{1,2}Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

Email: ¹682014607@student.uksw.edu, ²sitokdanamelkior@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi situs web Pemerintah Kota Tomohon. Dan didapatkan ada beberapa kekurangan didalam web site Kota Tomohon. Oleh sebab itu perlu di evaluasi dan memberikan saran kepada staf yang bertanggung jawab terhadap pengembangan situs web Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan isi konten situs web.

Kata Kunci: Evaluasi Kualitas Informasi, situs web, pemerintah daerah

1. Pendahuluan

Didalam perkembangan era globalisasi ekonomi, teknologi dan politik yang semakin berkembang dengan pesat, sehingga pemerintah dituntut menjadi pemerintahan yang bersih dan baik. Oleh karena itu semua pemerintahan yang ada di Indonesia menerapkan teknologi informasi untuk memberikan transparasi kepada masyarakat. Situs web sangat berperan penting terhadap pemerintahan dan juga terhadap masyarakat. Karena itu pemerintah membuat situs web agar supaya masyarakat tahu tentang, profil pemerintah, struktur organisasi, visi dan misi, program kerja, laporan anggaran, berita, pengumuman, laporan anggaran, dan lain-lain. Dan seharusnya situs web pemerintah memberikan informasi secara *real time*, tetapi sebagian pemerintahan masih belum memperhatikan masalah tersebut karena ada beberapa persoalan.

Berdasarkan hasil penelitian dan audit *e-Government* pada tingkat pemerintah daerah tampak bahwa rata-rata Situs Web pemerintahan berada pada tingkat pertama (persiapan), hanya sebagian kecil yang telah



mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai [1]. Hal tersebut disebabkan oleh, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan juga kinerja aparatur pemertintahan yang kurang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dari sistem web pemerintah Kota Tomohon. Situs web pemerintah Kota Tomohon sudah ada dari 2017 dengan nama domain <https://www.tomohon.go.id>, situs web memiliki menu beranda/home, berita, profil, layanan aplikasi. Berdasarkan penelusuran masih ada kekurangan terhadap situs web tersebut, sehingga perlu di berikan rekomendasi kepada kenanggung jawab situs web pemerintah Kota Tomohon.

Penelitian ini menggunakan dua instrumen untuk mengevaluasi kualitas Situs Web Pemerintah Kota Tomohon, yaitu: (1) menggunakan standar isi Situs Web Pemerintah Daerah yang ditetapkan Depkominfo dan (2) menggunakan 20 (dua puluh) dimensi kualitas informasi menurut Knight & Burn [3]. Kiranya dalam hasil penelitian ini, situs web pemerintah Kota Tomohon bisa di perbaiki dan di kembangkan sehingga bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Tinjauan Pustaka dan Teori

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan topik evaluasi situs web pemerintah di Indonesia bukanlah topik yang baru, maka ada beberapa penelitian terdahulu dijadikan refrensi dalam penelitian ini, antara lain: Penelitian Sitokdana, Melkior berjudul “Evaluasi Implementasi *eGovernment* Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Banjarmasin, Kota Makassar dan Kota Jayapura”. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas Situs Web, yaitu aspek transparansi, layanan, efisiensi, ekonomi, aspirasi, tampilan, update dan tahapan pencapaian tujuan *eGovernment*. Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa: Kota Surabaya jauh lebih baik dibanding Kota-kota lainnya. Hasil ini sama dengan evaluasi PeGi dari tahun 2012-2014 bahwa dalam pemeringkatan Situs Web *eGovernment* selama ini hanya didominasi oleh pemerintahan di Pulau Jawa. Untuk itu, direkomendasikan beberapa hal untuk peningkatan kualitas Situs Web *e-Government*, yaitu perlu penyempurnaan konten Situs Web, namun sebelumnya spek *e-Leadership*, Infrastruktur Jaringan

Informasi, Pengelolaan Informasi, Lingkungan Bisnis, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia dapat dirumuskan dengan baik dalam bentuk Rencana Strategis agar pengembangan dan implementasinya dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran[2].

Indikator yang sama digunakan Tonggiroh, Mursalim dalam jurnalnya berjudul "*Digital Government services in Papua*" dalam mengevaluasi Situs Web Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi *e-Government* di Papua masih jauh di bawah standar ideal. Dalam hal kompleksitas dan waktu, layanan *e-Government* pemerintah daerah di Provinsi Papua telah mencapai tahap Interaksi. Sementara hasil pengukuran tingkat kinerja dan efektivitas *e-Government* menunjukkan bahwa layanan tersebut belum memberikan manfaat yang signifikan terhadap pengunjung[4].

Penelitian Damanik, Marudur P. berjudul "*E-Government* dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur kualitas informasi website Pemerintah Kabupaten Bengkalis berdasarkan dimensi Akurasi, Kelengkapan, Kebaharuan, Relevansi dan Ketersediaan. Pengamatan terhadap 4 (empat) *website* di lingkungan Pemkab Bengkalis dilakukan beserta wawancara mendalam kepada masing-masing pengelolanya. Hasil yang diperoleh bahwa informasi yang tersedia di website Pemkab Bengkalis sudah memenuhi kualitas informasi yang baik, meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti adanya tautan (*link*) ke halaman kosong, sebagian penanggalan informasi yang belum tercantum, dan belum adanya jaminan kualitas jaringan untuk memastikan ketersediaan informasi[5].

2.2. Landasan Teori

E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau ***E-Goverment*** adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan

dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis[6].

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

- a. Pemerintah dengan Masyarakat (G2C)
- b. Pemerintah dengan Bisnis (G2B)
- c. Pemerintah dengan Pemerintah (G2G)

Manfaat penerapan *e-Government* adalah (1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. (2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good corporate governance*. (3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. (4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. (5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. (6) Memperdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis[7]. Dimensi Kualitas Informasi menurut Knight dan Burn adalah sebagai berikut.

Table 1. Dimensi Kualitas Informasi[5]

NO	DIMENSI KUALITAS INFORMASI	DEFINISI
1	Akurasi	Informasi bebas dari kesalahan
2	Konsistensi	Tidak bertentangan dengan informasi sebelumnya
3	Keamanan	informasi tertentu dibatasi dengan tepat
4	Ketepatan waktu	Informasi tersedia tepat waktu
5	Kebaharuan	Informasi diperbaharui setiap waktu/sesuai kebutuhan

6	Kelengkapan	Tidak ada bagian informasi yang hilang
7	Ringkas	Informasi singkat padat dan tepat
8	Kehandalan	Informasi dapat diandalkan
9	Keterjangkauan	Informasi mudah untuk didapatkan
10	Ketersediaan	Informasi dapat diakses setiap saat
11	Objektifitas	Informasi tidak bias dan tidak berat sebelah
12	Relevansi	Bermanfaat dan dapat digunakan untuk saat tertentu
13	Kemudahan penggunaan	Informasi jelas dan mudah digunakan
14	Jumlah data	Jumlah informasi yang tersedia untuk diakses
15	Kepercayaan	Informasi dapat dipercaya dan kredibel
16	Navigasi	Informasi mudah ditemukan dan dihubungkan ke informasi lain
17	Reputasi	Informasi menjadi rujukan terpercaya
18	Manfaat	Informasi membantu kelancaran tugas-tugas
19	Efisiensi	Informasi memudahkan tugas-tugas
20	Nilai tambah	Informasi memberikan manfaat lebih

Tabel 2. Tingkatan Pengembangan *e-Goverment*[8]

Tingkat 1	Persiapan	<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;• Penyiapan SDM;• Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana <i>Multipurpose Community Center</i>,• Warnet, <i>SME-Center</i>, dll;• Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
Tingkat 2	Pematangan	<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan situs informasi publik interaktif;• Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;

Tingkat 3	Pemantapan	<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;• Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
Tingkat 4	Pemanfaatan	<ul style="list-style-type: none">• Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.• Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat - 4. Perlu dipertimbangkan bahwa semakin tinggi tingkatan situs tersebut, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula.

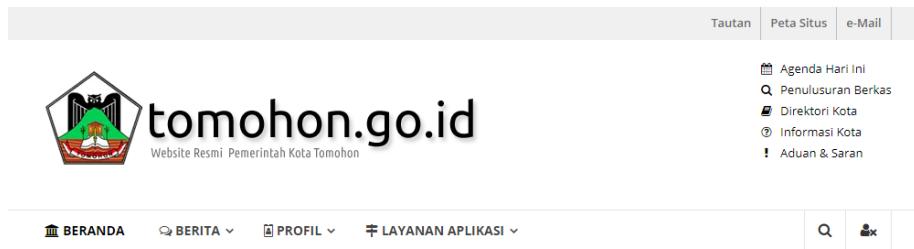
3. Metode Penilitian

Penelitian ini tentang Evaluasi Kualitas Informasi Situs Web Pemerintah Kota Tomohon dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode tersebut menurut Nawawi dan Martini adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya[9]. Sedangkan menurut Mukhtar mengatakan Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan[10]. Data penelitian didapatkan dari sumber situs web pemerintah Kota Tomohon yaitu <https://www.tomohon.go.id>.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Situs Web Pemerintah Dearah

Dalam analisis ini sejauhmana pengembangan situs web pemerintah Kota Tomohon. Dan juga apakah situs web pemerintah Kota Tomohon sudah memenuhi syarat yang ditetapkan dari Depkominfo. Ini adalah tampilan situs web Kota Tomohon.



Gambar 1. Tamplian utama situs web Kota Tomohon

Situs web pemerintah Kota Tomohon memiliki 12 menu halaman situs web, yaitu Beranda, Berita, Profil, Layanan Aplikasi, Tautan, Peta Situs, e-Mail, Agenda Hari Ini, Penulusuran Berkas, Direktori Kota, Informasi Kota, Aduan & Saran. Ini adalah penjelasan setiap menu yang ada di situs web Kota Tomohon:

1. **Beranda** : Menampilkan berita-berita terbaru, Infomasi, Pengumuman, survey kepuasan masyarakat, dan *Government Public Relations RI*(GPR).
2. **Berita** : Didalam menu Berita ada 2 kategori, yaitu *Berita Pemerintahan*, dan *Press Release*. Di *Berita Pemerintahan* memberikan berita seputaran Kota Tomohon dan juga kegiatan-kegiatan di pemerintahan kota Tomohon. Dan di *Press Release* memberikan pengumuman rapat dan kegiatan di Kota Tomohon.
3. **Profil** : Di menu Profil ada 8 kategori, yaitu visi dan misi, profil walikota, profil wakil walikota, lambang daerah, sejarah, budaya, geografi, jumlah penduduk. Tetapi di kategori jumlah penduduk belum di update karena yang di tampilkan hanya pada tahun 2011 - 2015.
4. **Layanan Aplikasi** : Di menu Layanan Aplikasi memiliki 1 kategori yaitu, MONEV dan LPSE. Di MONEV (Sistem monitoring dan evaluasi) menunjukan struktur anggaran Kota Tomohon yang langsung masuk di situs web www.monev.lkpp.go.id. dan untuk LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) menunjukan Pengadaan di kota Tomohon yang langsung masuk di situs web www.lpse.tomohon.go.id.
5. **Tautan** : Menampilkan situs web yang menjadi direktori.
6. **Peta Situs** : Tidak menampilkan peta hanya keluar seperti ini, [wp_sitemap_page only="post" sort="post_name" order="ASC"] [wp_sitemap_page only="page" sort="page_name" order="ASC"].

7. **e-Mail** : Di menu e-mail langsung masuk di situs web www.srv26.nigahoster.com.
8. **Agenda Hari Ini** : Di agenda hari ini tidak ada pengembangan, karena hanya menampilkan tanggal dan bulan saja tidak ada agenda apapun di dalamnya.
9. **Penulusuran Berkas** : Ini hanya untuk mencari berkas tertentu.
10. **Direktori Kota** : Tidak menampilkan apapun
11. **Informasi Kota** : Di Informasi Kota saat masuk di menu tersebut langsung di antar ke beranda.
12. **Aduan & Saran** : Di aduan dan saran saat masuk di menu tersebut langsung di antar ke situs web www.lapor.go.id

Setelah menjelaskan 12 menu yang ada di situs web kota Tomohon, berikutnya mengevaluasi apakah situs web kota Tomohon memenuhi standar syarat yang ditetapkan oleh Depkominfo. Mengacu pada standar tersebut maka konten yang harus ada dalam sebuah Situs Web Pemerintah Daerah adalah Selayang Pandang, Pemerintahan Daerah, Geografi, Peta Wilayah dan Sumberdaya, Peraturan/Kebijakan Daerah dan Buku Tamu. Standar konten tersebut dijadikan acuan utama dalam menilai Situs Web Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Berikut adalah hasil analisis dan rekomendasi peneliti berdasarkan standar yang ditetapkan Depkominfo [14], yaitu;

1. **Selayang Pandang**, yaitu menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, motto daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).
"Di situs web kota Tomohon semuanya menu sudah tersedia, namun saat di menu peta lokasi dalam bentuk peta belum tersedia".
2. **Pemerintahan Daerah**, yaitu menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta nama, alamat, telepon, e-mail dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya.
"Di situs web kota Tomohon tidak memiliki struktur organisasi. Hanya memiliki biodata pimpinan daerah".
3. **Geografi**, yaitu menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeris atau statistik harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya.

"Untuk geografi di dalam situs web kota Tomohon sudah lengkap. Tetapi mungkin ada yang harus diperbaiki dan nama instansi harus di tambahkan".

4. **Peta Wilayah dan Sumberdaya**, yaitu menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (sebaiknya digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional-Bakosurtanal, atau instansi pemerintah lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta), dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan para pengguna.
"Menu Peta sudah ada tetapi data tidak ada. Dan juga sumberdaya belum ada datanya".
5. **Peraturan/Kebijakan Daerah**, yaitu; menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah inilah semua Perda yang telah dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.
"Di dalam situs web kota Tomohon tidak ada perda yang ditampilkan".
6. **Buku Tamu**, yaitu tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemerintah daerah bersangkutan.
"Pada situs web kota Tomohon tidak ditmukan menu Buku Tamu. Yang ada hanya Aduan & Saran tetapi bukan situs web dari pemerintah kota Tomohon melainkan situs web dari pusat. Maka dari itu harus di tambahkan menu Buku Tamu".

4.2. Analisis Kualitas Situs Web Pemerintah Kota Tomohon

NO	DIMENSI KUALITAS INFORMASI	EVALUASI	REKOMENDASI
1	Akurasi	Terdapat beberapa masalah dan kegagalan dalam penyajian informasi seperti tidak ditampilkannya foto, sumber, atau link yang	Tampilkan informasi yang lebih lengkap dengan mencantumkan sumber, foto, atau penjelasan sehingga dapat meningkatkan

		dapat memberikan penjelasan lebih lanjut. Dan juga alamat kantor walikota tidak di berikan denah. Beberapa menu juga menampilkan informasi yang terlalu singkat seperti pada menu perangkat daerah yang menampilkan daftar instansi daerah tetapi tidak ada penjelasan tentang masing-masing instansi.	keakuratan dan ketepatan data dalam penyajian informasi.
2	Konsistensi	Pada umumnya informasi yang disajikan merupakan informasi yang terbaru. Namun, informasi yang lama tidak ditampilkan lagi.	Tampilkan seluruh informasi dari penerbitan pertama sehingga publik dapat melihat konsistensi dari informasi tersebut.
3	Kebaharuan	Berita yang di berikan tidak di perbaharui dari 2019	Pastikan informasi yang diberikan bisa tepat waktu, agar supaya masyarakat bisa membaca berita terbaru
4	Kelengkapan	Semua informasi yang diberikan belum lengkap sehingga masyarakat susah mendapatkan informasi	Perbaharui informasi yang ada sehingga masyarakat yang mau mengakses bisa gampang mendapatkan informasi yang ada di dalam website
5	Kehandalan	Informasi yang di berikan sudah handal, karena informasi yang di dapat langsung dari	Informasi yang di berikan dipertahankan

		pemerintah Kota Tomohon	
6	Ketersediaan	Informasi yang di sediakan oleh Pemerintah Kota Tomohon bisa di akses kapan saja dan di mana saja oleh siapa saja. Kecuali adanya gangguan internet atau dalam perbaikan.	Dipastikan informasi bisa terus di akses oleh masyarakat.
7	Relevansi	Informasi yang diberikan sangat bermanfaat tetapi masih ada beberapa kategori yang masih belum diperbarui	Perbaharui informasi yang ada, agar supaya informasi tetap yang diakses selalu terbaru
8	Kemudahan penggunaan	Dalam mengakses website melalui mobile masih belum baik, sehingga untuk mengakses situs web Kota Tomohon lewat mobile masih tergolong belum efesien	Perbaiki situs website Kota Tomohon agar supaya masyarakat yang mengakses menggunakan handphone bisa gampang.
9	Jumlah data	Jumlah data penduduk masih belum diperbarui sejak 2019 sehingga informasi jumlah penduduk yang ada di situs website Kota Tomohon masih data lama	Perbaharui data jumlah penduduk agar supaya masyarakat yang mengakses situs website Kota Tomohon bisa mengetahui berapa jumlah penduduk yang ada sekarang.
10	Reputasi	Informasi yang di berikan bisa dipercaya, karena informasi langsung dari	Pertahankan informasi yang ada agar supaya masyarakat bisa terbantu dan percaya

		pemerintah Tomohon	Kota	informasi yang diberikan
11	Manfaat	Informasi yang diberikan sangat bermanfaat karena ada transparansi dokumen, tetapi untuk sekarang masih belum diperbarui.		Pertahankan transparansi dokumen yang ada agar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dan juga perbaharui informasinya agar masyarakat bisa tahu data yang ada
12	Efisiensi	Layanan informasi dari situs web pemerintah Kota Tomohon belum memberikan efisiensi yang berarti bagi masyarakat karena beberapa layanan berupa subdomain instansi pemerintah hanya menampilkan halaman kosong.		Perbaikan terhadap subdomain yang kosong akan meningkatkan efisiensi dari layanan informasi publik.
13	Nilai tambah	Belum ada nilai tambah dari situs web Kota Tomohon		Pemerintah Kota Tomohon harus memberikan layanan tambahan, seperti aspirasi masyarakat dan juga nomor darurat yang ada di kota Tomohon

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dan evaluasi menggunakan 13 (tigabelas) dimensi kualitas informasi yaitu: Akurasi, Konsistensi, Kebaharuan, Kelengkapan, Kehandalan, Ketersediaan, Relevansi, Kemudahan penggunaan, Jumlah data, Reputasi, Manfaat, Efisiensi, Nilai tambah dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas informasi situs web Pemerintah

Kota Tomohon sudah cukup baik. Beberapa kekurangan yang ditemukan pada umumnya disebabkan oleh tautan yang error atau menuju ke halaman kosong. Berdasarkan hasil tersebut beberapa hal yang menjadi saran dari peneliti adalah Pemerintah Kota Tomohon harus selalu meningkatkan keakuratan penyajian informasi; konsisten dalam menyajikan informasi dengan menampilkan informasi yang terdahulu; pastikan bahwa data selalu lengkap dan jelas; pastikan adanya pemberitahuan terdahulu ketika maintenance; hadirkan nilai tambah untuk menarik minat publik dan menjadikan situs web <https://tomohon.go.id/> sebagai media utama layanan informasi masyarakat Kota Tomohon.

Daftar Pustaka

- [1] E. A. Sosiawan, "Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government di Indonesia," SemnasIF, pp. 99–108, 2008.
- [2] M. N. N. Sitokdana, "Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura," J. Buana Inform., vol. 6, no. 4, pp. 289–300, 2015.
- [3] S. Knight and J. Burn, "Developing a Framework for Assessing Information Quality on the World Wide Web Introduction – The Big Picture What Is Information Quality ?," Informing Sci. J., vol. 8, pp. 159–172, 2005.
- [4] Mursalim Tonggiroh, "Digital Government services in Papua," in 2017 Second International Conference on Informatics and Computing (ICIC), 2017.
- [5] M. P. Damanik, "e-Government Dan Aplikasinya Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)," J. Stud. Komun. dan Media, vol. 21, pp. 151–164, 2017.
- [6] B. Rahardjo, Membangun eGovernment. Bandung: Informatika, 2001.
- [7] P. J. Pascual, "e-Government, e-Primer for the information Economy,Society and Polity Series," UNDP-APPDIP, e-ASEAN Task Force., 2003.
- [8] R. E. dkk Indrajit, E-Government in Action. Yogyakarta: Andi, 2005.
- [9] S. Y. Rieh, "Judgment of information quality and cognitive authority in the Web," J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol., vol. 53, pp. 145–161, 2002.
- [10] D. M. Wang, R.Y. & Strong, "Beyond accuracy: What data quality means to data consumers," J. Manag. Inf. Syst., p. 533, 1996.